

**PENDAMPINGAN DALAM LAYANAN SKHPN DI KLINIK PRATAMA
REHABILITASI BNNP JAWA TIMUR**

Shelfi Anggraini¹, Radjikan²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

anggrainishelfi05@gmail.com, radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan narkotika di Indonesia, khususnya Jawa Timur, menjadi perhatian serius pemerintah. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Kegiatan magang ini bertujuan untuk memahami mekanisme pelayanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) dan program rehabilitasi di BNNP Jawa Timur. Metode pelaksanaan magang meliputi observasi, diskusi, dan partisipasi langsung dalam kegiatan pelayanan SKHPN dan pendampingan rehabilitasi. Hasil magang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai proses pelayanan SKHPN, tantangan yang dihadapi, serta pentingnya koordinasi lintas sektoral. Disimpulkan bahwa pendampingan dalam layanan SKHPN memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam memahami administrasi publik di bidang penanggulangan narkotika. Saran yang diajukan meliputi peningkatan sosialisasi dan pemanfaatan sistem informasi.

Kata kunci: Pendampingan SKHPN, rehabilitasi narkoba, BNNP jawa timur

ABSTRACT

The issue of narcotics in Indonesia, particularly East Java, is a serious concern for the government. The National Narcotics Agency of East Java Province (BNNP Jatim) has a strategic role in prevention, eradication, and rehabilitation efforts. This internship aims to understand the service mechanism of the Drug Examination Result Certificate (SKHPN) and rehabilitation programs at BNNP Jatim. The internship method included observation, discussion, and direct participation in SKHPN service activities and rehabilitation assistance. The results of the internship showed an increased understanding of the SKHPN service process, the challenges faced, and the importance of cross-sectoral coordination. It is concluded that assisting in SKHPN services provides valuable experience for students in understanding public administration in the field of narcotics control. Suggestions include increasing socialization and utilizing information systems.

Keywords: *SKHPN assistance, drug rehabilitation, BNNP east java*

PENDAHULUAN

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di wilayah Jawa Timur. Dalam upaya mencapai tujuannya, BNN Provinsi Jawa Timur melaksanakan berbagai program yang melibatkan masyarakat, instansi pemerintah, dan pihak swasta guna menciptakan lingkungan yang bebas dari narkotika. Program magang di BNN Provinsi Jawa Timur memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami lebih dalam mengenai kebijakan, strategi, serta mekanisme kerja dalam upaya pemberantasan narkotika di tingkat provinsi. Program magang merupakan salah satu bentuk implementasi dari kurikulum pendidikan tinggi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa sebelum mereka terjun ke dunia profesional. Magang menjadi jembatan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik yang diterapkan di dunia kerja. Melalui program ini, mahasiswa dapat memahami secara langsung

bagaimana suatu organisasi atau instansi bekerja, serta bagaimana kebijakan dan program diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, pemahaman mengenai kebijakan publik, koordinasi antar lembaga, serta implementasi program rehabilitasi menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Magang di BNNP Jawa Timur, khususnya di bagian rehabilitasi dan pembuatan SKHPN, memberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam bagaimana kebijakan rehabilitasi diterapkan dan bagaimana mekanisme administrasi dalam pembuatan SKHPN berlangsung. Bagian rehabilitasi memiliki peran penting dalam membantu individu yang terjerat penyalahgunaan narkoba agar dapat pulih dan kembali berfungsi dalam masyarakat. Sementara itu, pembuatan SKHPN menjadi instrumen administratif yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti persyaratan kerja, pendidikan, serta aspek hukum lainnya. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, diharapkan proses rehabilitasi dan penerbitan SKHPN dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Permasalahan narkotika di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk menangani permasalahan ini, salah satunya melalui layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba serta penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) sebagai bagian dari upaya monitoring dan pengawasan. Melalui kegiatan magang ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis, mengembangkan keterampilan administratif, serta memahami lebih dalam tantangan dan solusi dalam pengelolaan kebijakan rehabilitasi narkoba. Selain itu, magang ini juga menjadi peluang untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba melalui pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi serta praktik pelayanan publik yang diterapkan oleh BNNP Jawa Timur.

Permasalahan narkotika di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, menjadi perhatian utama pemerintah karena dampaknya yang sangat luas, mulai dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, hingga keamanan. Pemerintah, melalui BNNP Jawa Timur, berupaya untuk menanggulangi masalah ini dengan berbagai strategi, termasuk sosialisasi, rehabilitasi, serta penegakan hukum. Dalam konteks ini, keterlibatan mahasiswa dalam program magang di BNNP Jawa Timur menjadi sangat relevan, karena dapat memberikan kesempatan untuk mempelajari kebijakan serta strategi yang diterapkan oleh instansi ini dalam menghadapi permasalahan narkotika.

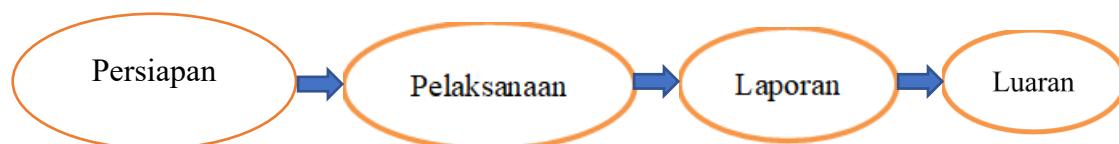
Melalui pengalaman magang di BNNP Jawa Timur, mahasiswa dapat mengamati bagaimana kebijakan pemberantasan narkoba dirancang dan diimplementasikan, bagaimana instansi ini berkolaborasi dengan berbagai pihak, serta bagaimana tantangan yang dihadapi dalam proses pemberantasan narkotika. Dengan demikian, program magang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, baik bagi mahasiswa dalam pengembangan kompetensi akademik dan profesional, maupun bagi BNNP Jawa Timur dalam memperoleh perspektif baru dari mahasiswa. Tujuan dari pengabdian magang ini adalah untuk memahami secara langsung mekanisme pelayanan SKHPN di Klinik Pratama Rehabilitasi BNNP Jawa Timur.

METODE PELAKSANAAN

Jenis kegiatan yang dilakukan penulis yaitu magang reguler yang bersifat individu. Magang reguler yang dilaksanakan penulis berlangsung selama kurang lebih 40 hari kerja, terhitung sejak tanggal 3 Februari hingga 9 April 2025. Jenis pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah pendampingan dalam pelayanan administrasi dan proses rehabilitasi di Klinik Pratama Rehabilitasi BNNP Jawa Timur. Lokasi magang mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya bertempat di Kantor BNNP Jawa Timur yang beralamat di Jl. Sukomanunggal No. 55–56, Surabaya.

Dalam proses magang ini, metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan mengikuti langsung kegiatan pelayanan, seperti proses permohonan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) dan pendampingan rehabilitasi rawat jalan. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan, keterampilan, dan pengalaman mahasiswa di bidang pelayanan publik dan administrasi kesehatan berbasis rehabilitasi sosial. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, yaitu mengamati secara langsung proses pelayanan di klinik, serta dokumentasi berupa pencatatan aktivitas dan pengumpulan dokumen terkait pelayanan SKHPN dan rehabilitasi.

1. Tahap 1 (PERSIAPAN)
Sebelum pelaksanaan magang, penulis diwajibkan menyusun proposal magang untuk diajukan dan disetujui oleh Kaprodi. Setelah mendapat persetujuan, penulis mengurus surat pengantar magang dari TU FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk disampaikan ke BNNP Jawa Timur.
2. Tahap 2 (PELAKSANAAN)
Pada tahap ini, penulis mengikuti pelaksanaan magang reguler di BNNP Jawa Timur mulai dari 3 Februari hingga 9 April 2025. Penulis terlibat aktif dalam pelayanan SKHPN melalui Web SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) adalah platform resmi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi proses pembayaran dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara elektronik melalui berbagai saluran, seperti ATM, internet banking, EDC, dan teller bank, pengisian formulir SKHPN secara daring, serta pendampingan pasien rehabilitasi rawat jalan. Penulis juga membantu dalam administrasi pelayanan dan melakukan pemantauan terhadap penggunaan Multi-Panel Test narkoba.
3. Tahap 3 (LAPORAN)
Pada tahap ini, penulis menyusun laporan berdasarkan hasil observasi, diskusi dengan pembimbing lapangan, serta pengalaman partisipasi selama magang berlangsung di BNNP Jawa Timur.
4. Tahap 4 (LUARAN)
Hasil kegiatan magang dituangkan dalam laporan magang, artikel pengabdian kepada masyarakat, dan dokumentasi visual (foto kegiatan) yang menggambarkan alur pelayanan SKHPN dan rehabilitasi.



Gambar 1. Bagan Pelaksanaan Magang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama pelaksanaan magang, penulis terlibat secara langsung dalam proses pelayanan SKHPN di Klinik Pratama Rehabilitasi BNNP Jawa Timur. Kegiatan yang dilakukan meliputi penerimaan berkas permohonan, penginputan data pemohon, membantu dalam proses asesmen awal, mengarahkan pemohon untuk tes urine, serta membantu pengarsipan dokumen SKHPN. Selain itu, penulis juga berkesempatan mendampingi pasien rehabilitasi rawat jalan, membantu dalam proses administrasi laporan perkembangan pasien, dan berinteraksi dengan staf rehabilitasi. Pengalaman langsung ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai alur dan mekanisme pelayanan SKHPN, mulai dari tahap pendaftaran hingga penerbitan surat. Penulis mengamati bahwa proses pelayanan SKHPN di BNNP Jawa Timur umumnya berjalan dengan baik dan terstruktur. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti peningkatan jumlah pemohon SKHPN pada waktu-waktu tertentu dan perlunya pemahaman yang lebih mendalam dari masyarakat mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan SKHPN. Dalam konteks program rehabilitasi, pendampingan yang dilakukan memberikan gambaran mengenai proses asesmen, penyusunan rencana terapi, dan pemantauan perkembangan pasien rawat jalan. Penulis melihat adanya upaya yang sungguh-sungguh dari BNNP Jawa Timur dalam memberikan layanan rehabilitasi yang komprehensif. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan perlunya peningkatan partisipasi aktif dari pasien menjadi catatan penting.

Pengalaman magang ini sejalan dengan konsep pelayanan publik yang efektif dan efisien. Kualitas pelayanan, sebagaimana diungkapkan oleh Parasuraman (Jasfar, 2005:51), meliputi keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti fisik (tangibles). Dalam konteks pelayanan SKHPN di BNNP Jawa Timur, aspek keandalan tercermin dari adanya prosedur standar dan hasil tes urine yang akurat. Aspek daya tanggap terlihat dari upaya staf dalam melayani pemohon dengan cepat. Jaminan diberikan melalui informasi yang jelas mengenai proses dan persyaratan. Empati ditunjukkan melalui sikap ramah dan membantu dari para petugas. Bukti fisik berupa fasilitas pelayanan dan dokumen SKHPN yang terorganisir. Namun, berdasarkan observasi penulis, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya SKHPN dan program rehabilitasi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendaftaran dan informasi status SKHPN juga dapat meningkatkan efisiensi dan daya tanggap pelayanan. Dalam pelayanan SKHPN dan program rehabilitasi di BNNP Jawa Timur, pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan good governance dalam pelayanan publik. Pendekatan ini menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Implementasi prinsip good governance tercermin dalam prosedur pelayanan yang standar, keterbukaan informasi terkait persyaratan SKHPN, akurasi hasil tes urine, serta upaya pelayanan rehabilitasi yang responsif terhadap kebutuhan pasien. Dengan menerapkan pendekatan ini, BNNP Jawa Timur berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Meskipun pendekatan pelayanan telah diterapkan, masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat
Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika maupun prosedur penerbitan SKHPN, sehingga diperlukan pendekatan sosialisasi partisipatif yang lebih intensif melalui edukasi langsung dan pemanfaatan media sosial.

2. Keterbatasan Tenaga Profesional
Keterbatasan jumlah tenaga profesional dalam layanan rehabilitasi dan pengelolaan SKHPN menyebabkan tingginya beban kerja, sehingga dibutuhkan strategi *capacity building* melalui pelatihan berkala, perekrutan tambahan, dan optimalisasi teknologi.
3. Kerja Sama Antarinstansi yang Belum Optimal Koordinasi antara BNNP dengan instansi eksternal masih perlu diperkuat untuk memperlancar layanan rehabilitasi secara terpadu, yang dapat diatasi dengan pendekatan kolaboratif.
4. Kendala Administrasi Beberapa kendala administratif, seperti keterlambatan penerbitan SKHPN dan pendataan pasien rehabilitasi, mengindikasikan pentingnya penerapan sistem manajemen berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan.



Gambar 2. Alat Multi-Panel Test



Gambar 3. Perpisahan Magang Bersama Kepala BNNP Jatim



Gambar 4. Pelayanan Pembuatan SKPHN

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelayanan SKHPN di Klinik Pratama Rehabilitasi BNNP Jawa Timur merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung program rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan pengamatan selama kegiatan magang, alur pelayanan SKHPN meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan, pengolahan data, hingga penerbitan surat keterangan. Setiap tahap tersebut membutuhkan ketelitian, kecepatan, dan koordinasi yang baik antar petugas.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang menghambat kelancaran layanan. Salah satunya adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya SKHPN dan prosedur pengajuannya, yang menyebabkan ketidakteraturan dalam proses administrasi. Selain itu, penggunaan sistem informasi yang masih sederhana membuat proses pelacakan data dan pendaftaran menjadi kurang efisien, sehingga berpotensi menambah beban kerja petugas.

Pelaksanaan pelayanan di BNNP Jawa Timur menunjukkan bahwa upaya perbaikan terus dilakukan, tetapi masih diperlukan penguatan dalam aspek sosialisasi, integrasi sistem, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Koordinasi lintas sektor, seperti dengan pemerintah daerah, sekolah, dan organisasi masyarakat, sangat penting untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya SKHPN dalam upaya rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Saran yang penting untuk mendukung optimalisasi pelayanan SKHPN adalah peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara terencana dan berkelanjutan, agar pemahaman tentang pentingnya SKHPN dapat lebih merata. Selain itu, perlu dikembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat. BNNP Jawa Timur juga perlu mempererat koordinasi dengan instansi terkait dan komunitas masyarakat, sehingga program rehabilitasi berbasis pelayanan SKHPN dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dakwah, Fakultas, D A N Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, and Banda Aceh, ‘KEDUDUKAN KLINIK PRATAMA DALAM PROSES’, 2021
- Fuada, Vina Badrotul, ‘IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RAWAT JALAN’, 2024
- Bahasa, Pilih, Bpjs Kesehatan, Kantor Pusat, J L Letjen, Suprapto Cempaka, and Putih Po, ‘Siaran Pers’, 4212938.5 (2016), 20–21